

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

Andi Muhammad Sadli, S.S., S.E., M.Si.

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, ams@stiemp.ac.id

Ida farida

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, idasuwondo24@gmail.com

Dr. Rakhmat, S.E, M.S.E

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, rachmatjabar@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Barat; 2) Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat; 3) Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat; 4) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) = 0,212, koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) = 0,045 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,501 > 1,97769$. 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) = 0,206, koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) = 0,042 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $2,427 < 1,97769$. 3) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Belanja Modal (X_3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai koefisien korelasi (r_{x_3y}) = -0,182, koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) = 0,033 nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,134 < 1,97769$. 4) Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan pengaruh negatif Belanja Modal (X_3) secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai koefisien korelasi ($R^y_{(1,2,3)}$) = 0,332, koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) = 0,110, dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $5,420 > 2,67$.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

**THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE, AND CAPITAL EXPENDITURES
TOWARD FINANCIAL PERFORMANCE OF REGENCY
AND MUNICIPAL GOVERNMENTS IN THE PROVINCE OF WEST JAVA
FISCAL YEAR 2016-2020**

Andi Muhammad Sadli, S.S., S.E., M.Si.

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, ams@stimp.ac.id

Ida farida

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, idasuwondo24@gmail.com

Dr. Rakhmat, S.E, M.S.E

Manajemen Keuangan STIE Mulia Pratama, rachmatjabar@gmail.com

The aims of this research to know the impact of: 1) Original Local Government Revenues to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of West Java. 2) Intergovernmental Revenue to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of West Java. 3) Capital Expenditures to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of West Java. 4) Original Local Government Revenues, Intergovernmental Revenue, and Capital Expenditures to Financial Performance of Regency and Municipal Governments in the Province of West Java.

The subject in this research is regency and municipality in the Province from West Java. The data used comes from Realization Report of APBD fiscal years 2016-2020. The technic of data collection are using documentation method. Pre-paid test analysis is using assumption classic test. The hypothesis test of this research is using simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis.

The result of the research shows that: 1) There are positive and significant effect of Original Local Government Revenue Financial (X_1) to Local Government Financial Performance (Y). It showed by correlation coefficient (r^x_{1y}) = 0,212, determination coefficient (r^2_{x1y}) = 0,045, and t arithmetic $2,501 > t$ table 1,97769. 2) There are positive effect however it not significant of Intergovernmental Revenue (X_2) to Local Government Financial Performance (Y). It showed by correlation coefficient (r^x_{2y}) = 0,206, determination coefficient (r^2_{x2y}) = 0,042, and t arithmetic $2,427 > t$ table 1,97769. 3) There are negative and significant effect of Capital Expenditure (X_3) Local Government Financial Performance (Y). It showed by correlation coefficient (r^x_{3y}) = -0,182, determination coefficient (r^2_{x3y}) = 0,033, and t arithmetic $-2,134 > t$ table 1,97769. 4) There are positive effect of Original Local Government Revenue Financial (X_1) and Intergovernmental Revenue (X_2), and negative effect of Capital Expenditure (X_3) to Local Government Financial Performance (Y) It showed correlation coefficient ($R^y_{(1,2,3)}$) = 0,332, determination coefficient ($R^2_{y(1,2,3)}$) = 0,110 and F arithmetic $5,420 > F$ table 2,67.

Keywords : Original Local Government Revenues, Intergovernmental Revenue, Capital Expenditures, and financial performance of Regency and Municipal Governments

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk mengatur kegiatan perekonomian daerah, suatu daerah harus membuat Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Sumber-sumber keuangan yang memadai baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat, merupakan sumber keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Jusuf Al Fahmi, Nur Diana, 2018). Permasalahan utama pada pendapatan daerah pada dasarnya adalah masih terdapat pada tingginya ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat.

Penerapan desentralisasi menekankan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya keuangan daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Namun Kenyataan yang terjadi adalah masih tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencatat kontribusi PAD seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat berkisar antara 14,07 sampai 22,44 persen pada tahun 2014-2018, sementara kontribusi dana perimbangan berkisar antara 35,34 sampai 44,72 persen, sisanya persentase pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PAD hampir di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat.

Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dari diterimanya dana tersebut, dan juga diimbangi dengan meningkatnya infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan lain yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Modal belum mencapai 30 persen sesuai ketentuan Pedoman Penyusunan APBD yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dari total belanja pemerintah daerah 35,6 persen dari anggaran tersebut direalisasikan untuk belanja pegawai. Sementara Belanja modal hanya mengambil porsi 19,4 persen.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 – 2020”**

Batasan Masalah

Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada dalam kinerja pemerintah, maka penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan skripsi ini terarah jelas pada sasarannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- a) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
- b) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
- c) Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah?
- d) Bagaimana pengaruh komponen ketiganya terhadap Kinerja Keuangan Daerah?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- b) Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- c) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- d) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a) Manfaat bagi penulis diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.
- b) Manfaat bagi pemerintah Kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dan alternatif penelitian yang baik dalam mengambil keputusan khususnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.
- c) Manfaat bagi pembaca serta peneliti lain, memberikan kontribusi teori sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi,
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai,
- 3) Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya,
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment),
- 5) Memotivasi pegawai,
- 6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Carunia (2017) Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah (Darise, 2008:137).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Disebutkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Menurut Djaenuri (2012) “Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Sejalan dengan tujuan pokoknya, Dana Perimbangan dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembayaran yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), serta memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Belanja Modal

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang

ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

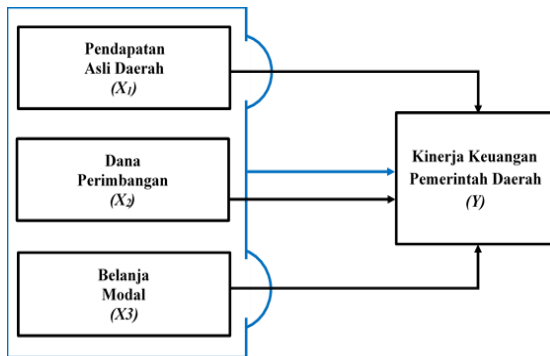
Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti akan membahas beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan :

- a) Abdullah (2015), Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan alokasi khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera bagian selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera bagian selatan periode 2011-2013. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera bagian selatan periode 2011-2013. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera bagian selatan periode 2011-2013.
- b) Fauzan Jauhar (2016), dengan judul Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota se-Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c) Tri Yuni Pratiwi (2018), dengan judul Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut :



Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (KKD) (Y), pengaruh variabel Dana Perimbangan (X_2) signifikansi terhadap KKD (Y), pengaruh variabel Belanja Modal (X_3) signifikansi terhadap KKD (Y), dan pengaruh Ketiganya (X_1 , X_2 , dan X_3) secara sekaligus signifikansi terhadap KKD (Y).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusana masalah di atas, maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
- Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
- Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Waktu Penelitian

Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data penelitian diperoleh dari resmi situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020- Oktober 2021.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2016-2020 yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Sampel

Sampel penelitian diambil secara komparatif (perbandingan) yaitu dengan cara menggunakan angka-angka pada laporan keuangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan membandingkan dengan data-data pada tahun sebelumnya.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, menggandakan, mengcopy, membaca, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 sampai dengan 2020. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (www.jabarprof.go.id).

Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Hasil penelitian mendukung hipotesis pertama bahwa variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis yang menggunakan regresi sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor $Y = 110,527 + 0,148 X_1$. Artinya nilai konstanta α yaitu 110,527 dan nilai Pendapatan Asli Daerah (b/koefisien regresi) sebesar 0,148 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi sebesar (r_{x1y}) sebesar 0,212 dan koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan 4,5% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), sementara 95,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,014 nilai t_{hitung} sebesar 2,501 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,97769 sehingga pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu

daerah dalam pemilikan potensi, penggalan, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribudi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan optimalisasi potensi dan sumber pendapatan suatu daerah tersebut sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya akan berdampak pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin baik.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Hasil penelitian dari hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor $Y = 111,344 + 0,052 X_2$. Artinya nilai konstanta α yaitu 111,344 dan nilai Dana Perimbangan (b/koeffisien regresi) sebesar 0,052 menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi (r_{x_2y}) sebesar 0,206 dan koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa 4,2% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Dana Perimbangan (X_2), sedangkan 95,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,005; nilai t_{hitung} sebesar 2,427 lebih besar dari t_{tabel} 1,97769 sehingga pengaruh variabel Dana Perimbangan (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Siti Nur Rochmah (2015) dan Yunita (2020) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah, akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2017) dan Prasasti (2020) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dimana semakin besar Dana Perimbangan yang diperoleh dari pemerintah daerah maka dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan

belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tingkat kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi hal ini bergantung kondisi daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah, serta adanya kewajiban untuk menjaga ketercapaian standar pelayanan minimum di setiap daerah. Daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi atau Dana Perimbangan agar dapat mencapai standar pelayanan minimum itu. Oleh karena itu dengan adanya Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun disisi lain, hal ini dapat pula menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tersebut tinggi, sehingga kemandirian suatu daerah tersebut menurun.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi satu prediktor $Y = 110,719 + (-0,004) (X_3)$. Artinya nilai konstanta α yaitu 110,719 dan nilai Belanja Modal (b/koeffisien regresi) sebesar -0,004 menunjukkan bahwa Belanja Modal (X_3) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Koefisien korelasi (r_{x_3y}) sebesar -0,182 dan koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa 3,3% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, sedangkan 96,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05; dan nilai t_{hitung} sebesar -2,134 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,97769 sehingga pengaruh Belanja Modal (X_3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah negatif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Siti Nur Rochmah (2015) dan Purwasih (2017) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, akan tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrid Anggraeni (2015) yang menyatakan hasil penelitiannya tidak menunjukkan dimana ada pengaruh yang signifikan positif Belanja Modal terhadap kinerja keuangan daerah. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Darwis (2015) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan daerah, Ia juga menyatakan belanja modal yang terjadi kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian antar daerah.

Hasil analisis perhitungannya menunjukkan bahwa meningkatnya belanja modal akan meningkatkan kinerja pemerintah tidak terjadi menurut penelitian yang saya lakukan. Tentu saja hal ini diluar harapan dan dugaan dalam penelitian ini. Hal tersebut dimungkinkan adanya anggaran belanja modal yg tidak terealisasi sesuai dengan pagu yang dialokasikan sehingga sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk membuktikan hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lengkap terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil dengan nilai konstanta α sebesar 110,404; Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,134; Dana Perimbangan sebesar 0,054; dan Belanja Modal sebesar -0,003 sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 110,404 + 0,134 X_1 + 0,054 X_2 - 0,003 X_3$.

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 0,134 yang berarti Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,134 dengan asumsi X_2 , dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_2 sebesar 0,054 berarti Dana Perimbangan meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,054 dengan asumsi X_1 dan X_3 tetap. Nilai koefisien X_3 sebesar -0,003 yang berarti Belanja Modal meningkat sebesar 1 satuan maka akan terjadi perubahan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar -0,003 dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap.

Hasil uji F dilihat dari tabel ANOVA dalam kolom sig. digunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$. Dari tabel ANOVA tersebut dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan nilai sebesar $5,420 > 2,6$. Artinya secara bersama-sama pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), dan Belanja Modal (X_3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan. Nilai koefisien korelasi ($R_{Y(1,2,3)}$) sebesar 0,332 dan nilai koefisien determinasi ($R^2_{Y(1,2,3)}$) sebesar 0,110 atau 11%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal sebesar 11% sedangkan sisanya yaitu 89% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.
- b) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah hanya menggunakan tiga analisis rasio, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal.
- c) Adanya keterbatasan penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi berupa data sekunder, dan tidak menggunakan data primer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 110,527 + 0,148 X_1$, nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) yaitu sebesar 0,212 dan nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,045. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,014 ($0,014 < 0,05$), dan nilai t_{hitung} sebesar 2,501 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,97769 ($2,501 > 1,97769$).
- b) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 111,344 + 0,052 X_2$, nilai koefisien korelasi (r_{x_2y}) yaitu sebesar 0,206; dan nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_2y}$) sebesar 0,042. Nilai signifikansi variabel Dana Perimbangan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,017 ($0,017 < 0,05$), dan nilai t_{hitung} sebesar 2,427 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,97769 ($2,427 > 1,97769$).
- c) Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan garis regresi $Y = 110,719 + (-0,004) X_3$, nilai koefisien korelasi (r_{x_3y}) yaitu sebesar -0,182; dan Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_3y}$) sebesar 0,033. Nilai signifikansi variabel Belanja Modal lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033 ($0,033 < 0,05$), dan nilai t_{hitung} sebesar -2,134 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,97796 ($-2,134 < 1,97796$).
- d) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif, sedangkan Belanja Modal Berpengaruh Negatif. Hal ini ditunjukkan persamaan regresi $Y = 110,404 + 0,134 X_1 + 0,054 X_2 - 0,003 X_3$, nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,332; dan nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,110. Nilai signifikansi dari ketiga variabel adalah 0,002 lebih kecil dibandingkan dengan nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05 ($0,002 < 0,05$), dan Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan nilai sebesar $5,420 > 2,67$.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

- a) Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi yaitu dengan pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi, karena Pendapatan Asli Daerah adalah penentu kemandirian daerah. Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat lebih meningkatkan investasi dalam bentuk fisik sehingga aset tetap setiap tahun meningkat, sehingga dengan adanya sarana yang meningkat maka dapat mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b) Masyarakat selaku perangkat pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan masukan dan saran terhadap kinerja pemerintah jika dilihat dari segi keuangan dan ditujukan untuk umum. Masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya untuk pemerintah yang lebih baik dengan cara sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sesuai kebutuhan masyarakatnya, terutama di daerah.
- c) Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi-provinsi lain mengingat ada 34 provinsi di Indonesia yang masih belum banyak diteliti. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Menganalisis variabel-variabel independen lainnya diluar dalam penelitian ini, yaitu Pajak Daerah, Real Estate, Capital, Grant, dan PDRB ataupun faktor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan mikro ekonomi agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzan Jauhar (2016), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab-Kota Se Sumatera Barat

Pratiwi, Triyuni (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016

Purwasih, (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Yunita, Putu Veny (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan

Astiti, Desak Nyoman (2016). Pengaruh Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Djaenuri. Aries. (2012). Hubungan Keuangan Pusat- Daerah. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Rochmah. Siti Nur. (2015). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)". Skripsi. UMS

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26

Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta

Supriyati. 2011. Belajar Dasar Akuntansi. Bandung: LABKAT PRESS UNIKOM

Siahaan. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta :Rajawali Pers.

Sugiyono. (2015). Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 119

Supriyadi, E. (2014). SPSS+ Amos Statistika Data Analisis. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.

www.djkg.depkeu.go.id. Diakses Rabu 15 September 2021.

www.jabarprov.go.id. Diakses Rabu 15 September 2021.

www.bps.go.id. Diakses Rabu 15 September 2021.

